



SALINAN

## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 01 TAHUN 2003

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT  
TAHUN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (3) Undang–Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - b. Bahwa oleh karena itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2003, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (1) dan (6 ) Undang Undand Dasar 1945 Perubahan Kedua;
  2. Tap. MPR/ II/ 2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Perundang –Undangan;  
Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1160);
  3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Daerah TK II Kutai;
  4. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  5. Undang – Undang RI Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  6. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  7. Undang – Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kota, Kutai Barat, Malinau, Kutai Timur, Kota Bontang;
  8. Undang – Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 perubahan Undang – undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang pengurusan ,  
Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1975 tentang Cara  
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan  
Tata Usaha, Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975  
Nomor 6);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah  
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 3691);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi  
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 3692);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan  
Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji  
Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan  
Pemerintah dari Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak  
Keuangan/Administratif Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana  
Perimbangan;
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan  
dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan  
dan Pertanggung Jawaban Keuangan Pelaksanaan Rekomendasi dan  
Tugas Pembantuan;
20. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara  
Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
21. Peraturan Pemerintah RI Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
22. Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan  
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Peraturan Pemerintah RI Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan  
Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 01a Tahun 2001 Tentang Penerbitan  
Lembaran Daerah ; (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun  
2001 Nomor 02)
25. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pembentukan  
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;  
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 05)
26. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 Tentang Tentang  
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat; ; (Lembaran Daerah  
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 06)
27. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pembentukan  
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai  
Barat; ; (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001  
Nomor 08)

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005. ; (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48)

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Kabupaten Kota;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN );
  3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 556/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus;
  4. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 1996;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 570 – 360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903 – 1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 617 Tanggal 18 September 1988;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 31 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903 – 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
  15. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 903/2735/SJ Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  16. Surat Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal PUMDA Nomor 114/A/2000 dan 911/1157/PUMDA tentang Pedoman Teknis Pembiayaan Anggaran Belanja Rutin Bagi Instansi Vertikal Eks Departemen yang dialihkan kepada Pemerintah Daerah;
  17. Surat Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal PUMDA Nomor 199/A/2000 dan Nomor 845/2233/PUMDA tentang Tata Cara Pemotongan Iuran Wajib Pegawai dan Tapperum Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- Mendengar : 1. Pembicaraan Rapat – Rapat Panitia Anggaran Tanggal, 06 Januari 2003 Sampai dengan Tanggal, 08 Januari 2003;  
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Tanggal, 22 Januari 2003 sampai dengan Tanggal, 29 Januari 2003.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2003.

**P a s a l 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2003 sejumlah Rp. 467.220.500.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

**A. PENERIMAAN**

- Pendapatan Rp. 467.220.500.000,00

**B. PENGELUARAN**

1. Belanja Rutin

- Rutin Gaji Rp. 59.031.299.200,00  
- Rutin Non Gaji Rp. 153.523.955.770,00

2. Belanja Pembangunan Rp. 254.665.245.000,00

3. Transfer Rp. 28.921.200.000,00

3. Dana Tak Tersangka :

- Dana Tak Tersangka Rp. 5.000.000.000,00  
- C A P Rp. 9.000.000.000,00

**P a s a l 2**

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan terdiri atas :

a. Pendapatan Rp. 19.338.831.569,00

b. Belanja Rp. 19.338.831.569,00

**P a s a l 3**

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada pasal (1) sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;  
(2) Pergeseran Pasal – Pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.  
(3). Rincian lebih lanjut ayat ( 1 ) Pasal ini sebagaimana lampiran – lampiran Peraturan Daerah ini :  
a. Lampiran I : Pendapatan  
b. Lampiran II : Belanja Rutin  
c. Lampiran III : Pembangunan

## Pasal 4

Lampiran – lampiran tersebut pada pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya tiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal .....

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ttd**

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal .....

**PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**ttd**

**ENCIK MUGNIDDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat



**Adrianus Joni, SH., MM.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790713 200502 1 005

Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat  
Nomor 02 Tahun 2003 Seri E